



REPUBLIK INDONESIA

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PADA
RAPAT PARIPURNA DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Jakarta, 30 September 2021

***Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Salam Sehat, Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,***

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Kami atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas segala masukan, arahan, dukungan, dan kerjasama yang sangat baik, sehingga seluruh proses pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal yang telah disepakati. Kami meyakini bahwa masukan, saran, pandangan konstruktif yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat dalam pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2022 baik secara langsung maupun daring akan menghasilkan APBN yang responsif, tangguh, serta mampu menghadapi dinamika dan risiko pandemi yang dapat berubah secara cepat pada tahun 2022.

Seperti yang telah sama-sama kita ketahui, Pemerintah dan Parlemen telah mengambil berbagai kebijakan penting dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang sangat luas dan

signifikan. Pengesahan UU No. 2/2020 atau penetapan Perpu No. 1/2020 merupakan landasan konstitusional untuk menjalankan kebijakan *extraordinary* mengambil langkah-langkah cepat, terukur, terkoordinasi, dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian. APBN mampu bergerak cepat dalam memberikan respon penanganan kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus terus bekerja keras untuk memulihkan perekonomian dan menyiapkan fondasi pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah telah mengeskalasi berbagai program perlindungan sosial sehingga dampaknya terhadap kemiskinan dan pengangguran dapat diminimalisasi. Stimulus dan insentif untuk membantu dunia usaha dapat segera dijalankan sehingga dampak destruksi yang parah ke dunia usaha dapat dimitigasi. Melalui program pemulihan ekonomi dan berbagai upaya penanganan Covid-19, Perekonomian Indonesia hanya mengalami kontraksi terbatas sebesar -2,1% di tahun 2020. Dampak kontraksi yang relatif kecil dibandingkan dengan berbagai negara lain di dunia. Ini merupakan suatu bukti bahwa kerjasama yang sangat baik antara Pemerintah dan DPR RI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait telah mampu secara optimal mengurangi dampak pandemi dan dengan tetap mendorong upaya berkelanjutan dalam menyehatkan perekonomian nasional.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Tahun lalu, di saat seperti ini di atas podium ini saya berdiri, Pemerintah kembali mendapatkan dukungan politik yang konstruktif dan solid dari Parlemen untuk mengesahkan APBN 2021. Saat itu, kita semua juga masih diliputi ketidakpastian yang tinggi karena pandemi. Sekali lagi, APBN 2021 pun kita desain untuk memiliki fleksibilitas untuk mengantisipasi munculnya ketidakpastian atau bahkan kejutan-

kejutan yang mungkin akan terjadi.

Bulan Juli yang lalu, sesuatu yang tidak kita harapkan pun datang menghampiri. Kasus Covid-19 mengalami eskalasi yang luar biasa hanya dalam waktu yang sangat singkat karena munculnya varian Delta. Respon cepat Pemerintah untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan secara regional mampu menahan eskalasi dan kembali menurunkan kasus harian Covid-19 sangat signifikan. Dalam situasi seperti ini, APBN kembali bekerja keras untuk memberikan dukungan dalam bidang kesehatan, menangani pasien Covid-19, vaksinasi, dukungan tenaga kesehatan, kembali menambah dan memperpanjang perlindungan sosial saat PPKM dan berbagai stimulus ekonomi. Dengan berbagai langkah yang cepat dan responsif kita semua berharap bahwa pandemi dapat terus terkendali sehingga tren pemulihan ekonomi akan terus semakin menguat.

Perlu kami garis bawahi bahwa kerja sama yang erat berbagai komponen bangsa, termasuk kerja sama Pemerintah dan Parlemen yang solid, memberi landasan yang kokoh atas keteguhan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi. APBN sebagai instrumen kebijakan *countercyclical* dapat dieksekusi secara efektif sehingga mampu meredam dampak negatif pandemi. Soliditas berbangsa dan bernegara serta iklim demokrasi yang kondusif membuat Indonesia dapat secara efektif mengambil berbagai langkah yang dibutuhkan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan dan kolaborasi konstruktif dari Ibu/Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sidang Dewan yang terhormat,

Hingga kini, pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman dan menjadi tantangan bagi negara manapun di dunia. Pemerintah

menyadari pengendalian pandemi merupakan kunci bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, Pemerintah akan tetap fokus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian. Selain itu, Pemerintah akan terus melakukan perbaikan strategi penanganan Covid-19 agar lebih efektif dalam mengendalikan penularan dengan mengakselerasi vaksinasi seluas-luasnya, memperkuat sistem kesehatan nasional, serta mendorong penerapan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru *“living with endemic”*.

Pemerintah memiliki optimisme yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi lebih kuat di tahun 2022. Optimisme tersebut tentunya sejalan dengan prospek perekonomian dan perdagangan dunia yang membaik meskipun kecepatan pemulihan antar negara akan berbeda. Kecepatan pemulihan ekonomi akan tergantung pada pengendalian kasus Covid-19, termasuk bagaimana akses dan pelaksanaan vaksinasi, serta adaptasi kebiasaan baru di setiap negara.

Capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2021 yang mencapai 7,07 persen (yoy) menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang kuat akan tercapai jika kasus Covid-19 dapat kita kendalikan. Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di awal pertengahan tahun 2021 menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah untuk semakin memperkuat upaya pengendalian kasus penularan Covid-19, agar momentum pemulihan dapat kembali berlanjut. Pemerintah menyadari pentingnya APBN yang antisipatif dan fleksibel dalam merespon kebutuhan intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha untuk mengakselerasi pemulihan.

Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin

membalik pada tahun 2021, maka **proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan sebesar 5,2 persen**, Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan.

Ditinjau dari sumber-sumber pertumbuhannya, kinerja ekonomi di tahun 2022 terutama akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan internasional. Tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat akan mendorong kinerja konsumsi dan membaiknya sisi produksi yang menggerakkan perekonomian. Pemerintah bersama otoritas moneter akan berupaya dalam mengendalikan inflasi untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan akan mewujudkan pemerataan pembangunan.

APBN telah menunjukkan perannya sebagai instrumen *counter cyclical* dalam meredam dampak pandemi dan mendorong perekonomian untuk kembali pulih. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong **tingkat kemiskinan kembali menurun pada tahun 2022 berada pada kisaran 8,5 – 9,0 persen, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,5-6,3 persen, perbaikan ketimpangan (*gini ratio*) menjadi 0,376-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,41-73,46.**

Sidang Dewan yang terhormat,

Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp1.846.1** triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar **Rp1.510.0** triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp335,6 triliun**. Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai faktor perekonomian seperti kondisi sektoral, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan, serta kapasitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, kontribusi PNBPN terhadap APBN akan terus dioptimalkan dengan pengelolaan yang semakin membaik. Peran PNBPN sebagai instrumen kebijakan sektoral melalui fungsi *regulatory*, juga akan didorong terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, investasi, serta pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Negara dalam APBN tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp2.714,2** triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.944.5** triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar **Rp769,6 triliun**. Belanja Negara dialokasikan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan dengan upaya reformasi struktural. Berbagai program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian masih akan berlanjut agar dapat menstimulasi perekonomian, sehingga target penyelesaian program-program prioritas nasional dapat tetap tercapai. Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2022 akan diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Dalam merespon dinamika perekonomian global maupun

domestik, akselerasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta mendukung reformasi struktural, kebijakan fiskal tahun 2022 masih bersifat *countercyclical* yang ekspansif dalam rangka menstimulasi perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. **Sejalan dengan hal tersebut, defisit APBN 2022 telah disepakati sebesar 4,85 persen terhadap PDB atau sebesar Rp868,0 triliun.** Catatan dan masukan Fraksi-fraksi DPR dalam penetapan APBN tahun 2022 akan menjadi perhatian Pemerintah dalam menjalankan pengelolaan fiskal di tahun 2022 dalam mengantisipasi ketidakpastian.

Pemerintah berterima kasih atas perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terus mendorong pengelolaan fiskal agar lebih sehat dan berkesinambungan di tengah upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Secara bertahap defisit APBN telah menurun dari 6,14% pada tahun 2020, menjadi 5,7% dalam APBN Tahun 2021, dan 4,85% dalam APBN Tahun 2022. Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan konsolidasi dan penguatan reformasi fiskal di tahun 2022 dalam proses transisi menuju defisit di bawah 3% PDB pada tahun 2023.

Dalam menghadapi tantangan luar biasa (*extraordinary*) yang masih akan kita hadapi pada tahun 2022, Pemerintah sangat menghargai dukungan DPR untuk dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan ekonomi dan keuangan negara yang tepat, efektif, terukur, dan terkoordinasi agar Indonesia mampu kembali tangguh dan tumbuh.

Itikad baik telah diniatkan, ikhtiar bersama akan terus kita optimalkan, dan tawakal kepada Allah SWT perlu kita yakinkan. Dengan ikhtiar dan doa serta permohonan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Insyallah, semua langkah yang direncanakan dan dilaksanakan selalu mendapat ridho dan tuntunan yang benar dalam melindungi

rakyat dan tumpah darah Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat. Semoga upaya kita untuk membangun negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai mendapat berkah dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sekian dan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi
Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.***

Jakarta, 30 September 2021

**a.n. Pemerintah Republik
Indonesia**

Menteri Keuangan,

Ttd

Sri Mulyani Indrawati